



Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Triyono Hari Kuncoro

Masyarakat Harus Semakin Mudah Dilayani

Komisi A DPRD Kota Yogyakarta terus memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan pelayanan Pemkot Yogyakarta kepada masyarakat. Salah satunya, seperti melalui mal pelayanan publik (MPP).



MPP dihadirkan untuk melayani hal-hal yang tidak bisa melalui daring atau online. Sehingga secara fisik harus datang,"

TRIYONO HARI KUNCORO
 Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta

DALAM layanan MPP tersedia gerai-gerai dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan instansi lainnya.

"MPP dihadirkan untuk melayani hal-hal yang tidak bisa melalui daring atau online. Sehingga secara fisik harus datang," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Triyono Hari Kuncoro saat berbicara dalam diskusi bertajuk "Pelayanan Masyarakat di Kota Yogyakarta."

Dikatakan, secara umum pelayanan publik yang diberikan pemkot sudah berjalan relatif baik. Pelayanan memakai sistem online sebagai bagian dari era digitalisasi layanan juga berlangsung. Itu ditandai dengan adanya aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

Menyikapi sudah berjalannya berbagai layanan secara daring maupun luring itu, Komisi A dalam waktu dekat hendak mengadakan kajian pelayanan publik. Menurut Kuncoro, saat pelayanan publik di Kota Jogja tinggal penyempurnaan. "Secara umum sudah berjalan bagus. Masyarakat makin mudah dilayani," katanya.

Kalaupun terjadi kekurangan, dia melihat bukan pada faktor layanan yang diberikan pemkot. Namun kendala muncul dari masyarakat sendiri. Misalnya karena pelayanan secara online,



TEKNOLOGI INFORMASI: Kota Yogyakarta ditunjuk sebagai salah satu percontohan pelaksanaan MPP digital yang diterapkan pemeriksaan pusat. MPP Kota Jogja dinilai cukup baik dan siap menjalankan program Kementerian PAN/RB.

dibutuhkan gadget yang memadai. Ternyata masyarakat tidak memiliki ponsel yang mendukung. "Jadi faktornya bukan *angel* karena dipersulit. Tapi karena memang tak punya akses," bebarnya.

Dia memahami kondisi tersebut. Sebagian masyarakat masih memakai model analog alias manual. Kuncoro mengibaratkan kondisi tersebut sebagai masa kolonial dan zaman milenial. "Beda sekali," papar Kuncoro.

Menyinggung tentang OPD yang banyak bersinggungan dengan masyarakat, Kuncoro menyebut beberapa instansi. Mulai dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), serta badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).

Dinas kesehatan berada di urutan pertama karena punya layanan puskesmas. Disusul BPKAD terkait keuangan dan pajak serta dinas dukcapil berhubungan dengan pembuatan kartu keluarga (KK) dan akta lahir. "Kalau ada keluhan tidak banyak. Itu masih wajar," katanya.

Komisi A, sambung dia, memberikan dukungan anggaran dan nonanggaran. Soal non anggaran antara lain dengan pembuatan peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik. Juga dukungan instrumen lain terkait koordinasi dengan lintas OPD maupun SDM. Soal terakhir biasanya dikoordinasikan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota

Yogyakarta. "Kebetulan OPD terkait seperti dinas kominfo dan BKPSDM juga sama-sama mitra Komisi A. Jadi lebih mudah dikoordinasikan," jelas Kuncoro. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan MPP punya 98 layanan perizinan dan non perizinan. Semua menjadi kewenangan pemkot. Di samping itu, juga ada gerai dari instansi lain seperti imigrasi, Balai Besar POM, BPJS dan lainnya.

Pemkot, terang Kadri, juga ditunjuk sebagai salah satu percontohan MPP digital oleh pemerintah pusat. MPP digital diinisiasi Kementerian PAN/RB. "Kami salah satu yang ditunjuk," ujar Kadri. (**kus/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005